

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PENANGANAN KEMISKINAN SOSIAL

*Endang Murti*¹, *Harianto*², *Agus Wiyaka*³
^{1,2,3}Universitas Merdeka Madiun
endangmurti@unmer-madiun.ac.id

Abstract

Until now, the problem of social poverty has not been completely resolved, various social service programs have been carried out but have not been able to become the right solution to solve the poverty problem. This is due to: first, the orientation of the social service program is more of a help nature, thus creating dependence on the community to the government. Second, social service programs are not empowering so that the use of social assistance tends not to be used for productive purposes. The empowerment of MSMEs is strategic because the target is more for small business actors, which are mostly carried out by the poor, so that MSME empowerment can be an alternative to overcome social poverty. Empowerment of MSMEs with various coaching/training activities, capital assistance, technology transfer, up to marketing facilities, is expected to increase people's income so as to reduce the burden on the community in meeting the minimum standard of living needs. For this reason, this study conducted a study between the empowerment of MSMEs on the handling of social poverty.

Keywords: *Empowerment, SMEs, poverty.*

Abstrak

Permasalahan kemiskinan sosial hingga saat ini belum dapat diselesaikan dengan tuntas, berbagai program layanan sosial telah dilakukan namun belum mampu menjadi solusi yang tepat untuk menuntaskan masalah kemiskinan tersebut. Hal ini disebabkan: pertama, orientasi program layanan sosial lebih bersifat bantuan sehingga menimbulkan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Kedua, program layanan sosial tidak bersifat pemberdayaan sehingga pemanfaatan bantuan sosial cenderung tidak digunakan untuk keperluan produktif. Pemberdayaan UMKM menjadi strategis karena sasaran lebih diperuntukkan kepada pelaku usaha kecil yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat miskin, sehingga pemberdayaan UMKM dapat menjadi alternatif untuk mengatasi kemiskinan sosial. Pemberdayaan UMKM dengan berbagai kegiatan pembinaan/pelatihan, bantuan permodalan, transfer teknologi, sampai dengan fasilitas pemasarannya, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi standart minimal kebutuhan hidupnya. Untuk itu, penelitian ini melakukan kajian antara pemberdayaan UMKM terhadap penanganan kemiskinan sosial.

Kata kunci: *Pemberdayaan, UMKM, kemiskinan.*

PENDAHULUAN

UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, karena UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam membuka lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat kecil secara tidak langsung. UMKM sebagai pelaku usaha yang sebagian besar dijalankan oleh pelaku ekonomi rakyat, untuk itu perlu dipelihara, dijaga, dan dikembangkan kesinambungannya agar eksistensi dan peran UMKM mampu membentuk perekonomian yang kuat dan mampu bersaing di era ekonomi global dan perdagangan bebas. Menurut Miranda Goeltom (2005) dalam Azis dan Ruslan (2009), mengemukakan bahwa: di Indonesia, UMKM selama ini berperan sebagai sumber penciptaan lapangan kerja pendorong utama roda perekonomian di pedesaan, yang banyak memberikan andil dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Pengalaman menunjukkan bahwa ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, UMKM dengan beberapa kelebihan tersebut dapat bertahan terhadap guncangan krisis ekonomi dan tetap menunjukkan eksistensinya di dalam perekonomian. Lebih lanjut World Bank (2005) dalam Azis dan Ruslan (2009), menyatakan bahwa: Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dan pembangunan ekonomi yang amat vital dalam menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. Hal ini karena UKM cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. Laju penciptaan lapangan pekerjaan oleh UKM juga lebih cepat dari pada sektor lainnya, merekapun cukup terdiversifikasi dan berkontribusi dalam ekspor dan perdagangan. UMKM dinilai lebih produktif dalam penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, memperkokoh struktur perekonomian nasional dan berkontribusi dalam peningkatan PDB. Selain itu, pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997-an, banyak sektor lain goyah bahkan gulung tikar namun sektor UMKM telah terbukti mampu bertahan dan dapat memproduksi dengan baik. Menurut Partomo dan Soejoeno (2002) dalam Yushinta (2006), terdapat beberapa alasan UKM bisa bertahan dan cenderung meningkat jumlahnya pada masa krisis adalah sebagai berikut: (1). Sebagian besar UKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan. (2). Sebagian besar UKM tidak mendapat modal dari bank. Implikasinya keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga tidak banyak mempengaruhi sektor ini. (3). UKM mempunyai modal yang terbatas dan pasar yang bersaing, dampaknya UKM mempunyai spesialisasi produksi yang ketat. UKM mudah untuk pindah dari satu usaha ke usaha yang lain dan tidak ada hambatan keluar-masuk. (4). Reformasi menghapuskan hambatan-hambatan di pasar, proteksi industri hulu dihilangkan, UKM mempunyai pilihan lebih banyak dalam pengadaan bahan baku. Akibatnya biaya produksi rendah dan efisiensi dapat ditingkatkan. (5). Sektor formal banyak memberhentikan pekerja-pekerjanya, sehingga para pengangguran memasuki sektor informal yaitu melakukan kegiatan usaha yang umumnya berskala kecil dan pada akhirnya meningkatkan jumlah UKM (http://www.ekonomirakyat.org/edisi_14/artikel_2.htm)

Potensi UMKM yang begitu besar membuat pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk terus memberdayakan UMKM, karena sebagai bagian strategi dalam memulihkan perekonomian nasional, termasuk dalam pengentasan kemiskinan sosial. Kemandirian, daya tahan dan ketangguhan UMKM saat krisis menjadikan UMKM sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang dinilai mampu memberdayakan masyarakat miskin dan berperan penting dalam pemerataan pendapatan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, UMKM juga sebagai penyelamat dan pendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta sebagai alternatif kebijakan untuk pemerataan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Meskipun demikian, peranan UMKM tersebut masih belum diimbangi dengan penyelesaian berbagai permasalahan UMKM yang belum kunjung usai, baik masalah internal maupun eksternal. Selain itu, persaingan usaha yang semakin ketat sebagai dampak dari perdagangan bebas, ikut serta mempersempit ruang gerak UMKM, seperti masuknya produk-produk dari luar dengan harga yang murah namun memiliki mutu dan kualitas yang baik. Di dalam negeri juga terjadi persaingan dengan produk lokal yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang lebih maju dan modern, maka menuntut UMKM untuk bekerja lebih baik lagi dengan segala keterbatasan yang ada. Perkembangan UMKM masih dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor. Persoalan utama yang dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Dengan segala persoalan yang ada, potensi UMKM yang besar itu menjadi terhambat. Meskipun UMKM dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis global namun pada kenyataannya permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan lebih berat. Hal itu dikarenakan selain dipengaruhi secara tidak langsung krisis global tadi, UMKM harus pula menghadapi persoalan domestik yang tidak kunjung terselesaikan seperti masalah upah buruh, ketenagakerjaan dan pungutan liar, korupsi dan lain-lain. Bahkan beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa persoalan yang dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga sulit berkembang antara lain: ketidakmampuan dalam manajemen, lemahnya kemampuan dalam pengambilan keputusan, kurang berpengalaman, dan lemahnya pengawasan keuangan. Menghadapi persoalan-persoalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah dikemukakan di atas, pemerintah sebagai pihak penyelenggara negara telah melakukan berbagai upaya yang sekaligus menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kinerja dan daya saing ekonomi melalui pembentukan kementerian yang menangani Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Nursalam, 2010)

Secara yuridis komitmen Pemerintah ditandai dengan dikeluarkan beberapa regulasi yang terkait dengan UMKM. Undang-undang Nomor: 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang bertujuan antara lain untuk mewujudkan peran usaha kecil sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional. Undang-undang tersebut, ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan sebagai salah satu bentuk upaya penciptaan iklim usaha melalui kerjasama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM) dengan Usaha Besar. Oleh karena itu, dalam peraktek Usaha Kecil dan

Menengah (UKM) seringkali berada dalam posisi yang lemah, maka Pemerintah berupaya untuk memperbaiki situasi ini secara yuridis melalui Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pembentukan dan peran serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) baik ditingkat pusat maupun daerah dalam membina dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kebijakan perkreditan yang khusus diperuntukan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengatasi kelemahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh akses terhadap sumber-sumber permodalan juga sudah banyak yang dilakukan. Banyak upaya yang sudah dilakukan Pemerintah yang bertujuan meningkatkan kinerja dan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Nursalam, 2010).

Upaya pemberdayaan UMKM diatas, secara garis besar menjadi bagian dari usaha pemerintah dalam meningkatkan perekonomian rakyat dan sekaligus untuk mengatasi kemiskinan sosial melalui pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Karena kemiskinan salah satu diantaranya disebabkan rendahnya pendapatan masyarakat sehingga masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi minimal standart kebutuhan hidup. Bank Dunia dalam publikasinya, *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty*, mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan dengan standar kehidupan layak tidak tercapai. Lebih lanjut, Bank Dunia menggunakan ketidakcukupan sandang, pangan, dan papan; ketidakmampuan untuk mengakses perawatan kesehatan; dan rendahnya akses terhadap pendidikan, sebagai indikator untuk menandai seseorang dikategorikan miskin atau tidak. Demikian pula, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam publikasinya, *The World Situation Report 1997*, menggambarkan kemiskinan sebagai kondisi yang berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sebagaimana Bank Dunia, PBB juga mengajukan beberapa indikator teknis yang dapat digunakan sebagai penanda miskin atau tidaknya seseorang, seperti kurang gizi, buta huruf, kesehatan yang buruk, pakaian dan perumahan yang tidak layak, dan ketidakberdayaan (<http://www.tnp2k.go.id/download/79169WP480304FINAL.pdf>). Dengan pemberdayaan UMKM diharapkan dapat mendorong mobilitas usahanya sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat kecil dan sekaligus dapat mengurangi beban masyarakat kecil dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan, bagi masyarakat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam mendayagunakan sebagai pelaku usaha dapat bekerja pada sektor UMKM, karena tingkat penciptaan lapangan kerja lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan besar. Melalui pembinaan dan pelatihan secara sistematis dan terstruktur akan meningkatkan produktifitas UMKM dan daya saing produk baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga membuka kesempatan bagi UMKM untuk lebih maju dan berkembang.

MASALAH

Permasalahan penanganan kemiskinan sosial selama ini belum dapat terselesaikan secara tuntas, berbagai program yang diluncurkan pemerintah ternyata masih kurang efektif karena orientasi program sosial cenderung bersifat bantuan sosial. Untuk itu, penelitian ini membuktikan penanganan kemiskinan sosial melalui program pemberdayaan masyarakat, dan salah satu diantaranya pemberdayaan UMKM. Maka dari itu rumusan masalah yang akan dikaji adalah: Apakah terdapat pengaruh Pemberdayaan UMKM terhadap penanganan Kemiskinan Sosial.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam berbagai literatur, pengertian kemiskinan dipahami dalam berbagai dimensi yang berbeda. Dalam konteks ekonomi, kemiskinan dipahami sebagai akibat rendahnya pendapatan masyarakat. Ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya disebabkan karena tingkat pendapatan yang rendah, seperti penjelasan Bappenas (2004), bahwa: kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Untuk mewujudkan hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang miskin Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*), pendekatan kemampuan dasar (*human capability approach*) dan pendekatan *objective and subjective* (<http://www.braindilogsociology.or.id/2017/12/strategi-penanggulangan-kemiskinan-di.html>).

Menurut Nugroho (1995), kemiskinan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar hidup terutama standar kebutuhan kesehatan masyarakat dan standar pendidikan, akibatnya kemampuan untuk mencapai standar kesejahteraan menjadi rendah seperti: (1)Ketersediaan pangan tidak sesuai atau tidak mencukupi standar gizi yang disyaratkan sehingga beresiko mengalami mal gizi atau kondisi gizi rendah yang selanjutnya sangat rentan terhadap resiko penyaki menular. (2)Kesehatan relatif kurang terjamin sehingga rentan terhadap seranganpenyakit dan kemampuan untuk menutupi penyakit juga relatif terbatassehingga sangat rentan terhadap resiko kematian. (3)Perumahan atau pemukiman yang kurang/tidak layak huni sebagai akibat keterbatasan pendapatan untuk memiliki/mendapatkan lahan untuk tempat tinggal atau mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kondisi ini akan berdampak mengganggu kesehatan. (4)Taraf pendidikan yang rendah. Kondisi ini disebabkan karena keterbatasan pendapatan untuk mendapatkan pendidikan yang diinginkan atau sesuai dengan standar pendidikan. Lebih lanjut Nugroho (1995) menjelaskan bahwa: kondisi-kondisi akibat keterbatasan atau rendahnya pendapatan di atas menyebabkan terbentuknya status kesehatan masyarakat yang

dikatakan rendah (*morbidity*) atau berada dalam kondisi gizi rendah. Kondisi seperti ini sangat rentan terhadap serangan penyakit dan kekurangan gizi yang selanjutnya disertai tingginya tingkat kematian (*mortality*). Angka mortalitas yang tinggi dan keadaan kesehatan masyarakat yang rendah akan berdampak pada partisipasi sosial yang rendah, ketidakhadiran yang semakin tinggi, kecerdasan yang rendah, dan ketrampilan yang relatif rendah. Lebih lanjut diraikan sebagai berikut: (1) Tingkat Partisipasi Sosial Yang Rendah. Kondisi kesehatan maupun gizi yang rendah menyebabkan ketahanan fisik atau modal fisik yang diperlukan untuk partisipasi sosial menjadi rendah. Hal ini dikarenakan kesehatan yang terganggu tidak dapat menunjang partisipasi secara penuh baik di lingkungan kemasyarakatan maupun di lingkungan kerja. Sebagian besar golongan masyarakat miskin relative jarang terlibat secara aktif dalam aktivitas sosial. (2) Absensi Meningkat. Faktor kualitas kesehatan yang rendah tidak mendukung adanya aspek kehadiran dalam aktivitas kemasyarakatan baik di lingkungan sosial, pendidikan, maupun pekerjaan. Akibatnya, ketidakhadiran atau absensi dalam segala aktivitas menjadi semakin meningkat sehingga tidak memiliki kesempatan untuk berperan secara aktif dalam lingkungan social tersebut. (3) Tingkat Kecerdasan Yang Rendah. Faktor gizi buruk ataupun kualitas kesehatan yang rendah akan berdampak pada menurunnya kualitas intelektual. Seperti diketahui bahwa kinerja otak manusia yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah memerlukan gizi yang memadai atau ideal. Kekurangan gizi termasuk faktor yang paling utama terhadap adanya penurunan kualitas intelektual. (4) Ketrampilan Yang Rendah. Pada prinsipnya, ketrampilan merupakan salah satu bentuk dari adanya kreativitas. Aktivitas ini harus ditunjang dengan kondisi kesehatan yang mencukupi dan tentunya adalah kualitas intelektual yang memadai. Masyarakat yang mengalami kekurangan gizi ataupun rentan terhadap gangguan kesehatan relatif sulit untuk mengembangkan ketrampilannya. Hal ini dikarenakan dukungan kesehatan untuk menunjang pengembangan kreativitas kerja relatif rendah sehingga tidak memiliki banyak kesempatan untuk meningkatkan kualitas ketrampilannya. (<http://e-journal.uajy.ac.id/1756/3/2EP15294.pdf>).

Dari perspektif diatas, kemiskinan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: *pertama*, kemiskinan menunjukkan suatu kondisi seseorang yang berada dalam kondisi serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. *Kedua*, kemiskinan dinyatakan ketidakmampuan individu atau keluarga untuk memanfaatkan sumber daya yang ada guna menunjang kegiatan usahanya. Keterbatasan kemampuan menjadikan keterbatasan mobilitasnya, sehingga berdampak pada pendapatan masyarakat. Menurut Chamber (1987) berpendapat bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki enam dimensi, yaitu: (1) Kemiskinan (*Proper*). Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pula pada kelompok yang telah memiliki pendapatan. (2) Ketidakberdayaan (*Powerless*). Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh

keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (3) Kerentanan menghadapi situasi darurat (*State of emergency*). (4) Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di mana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat mencukupinya. Kondisi dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini. (5) Ketergantungan (*dependency*). Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan. (6) Keterasingan (*Isolation*). Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan (<http://e-journal.uajy.ac.id/1756/3/2EP15294.pdf>).

Pada umumnya masyarakat miskin lebih cenderung bergerak dalam kegiatan UMKM, dengan skala kecil yang memanfaatkan potensi sumber daya yang ada. Untuk itu, komitmen pemerintah dalam upaya memberdayakan UMKM menjadi strategis dalam memobilisasi kegiatan usaha kecil, guna memiliki nilai tambah produktifitas yang dihasilkan. Namun demikian, kegagalan pemberdayaan UMKM selama ini disebabkan karena kurang tepat memahami permasalahan UMKM. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) membagi UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja, *pertama* kerajinan rumah tangga dengan jumlah tenaga kerja dibawah 3 orang termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar. *Kedua*, usaha kecil dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 5-9 orang dan *ketiga*, usaha menengah dengan tenaga kerja sebanyak 20-99 orang. Aspek lain, yang dapat diketahui dari karakteristik UMKM, adalah bahwa usaha mikro dan kecil, biasanya memberikan kontribusi utama dalam penghasilan rumah tangga, pemilikan perusahaan secara pribadi, belum memiliki struktur organisasi dan perencanaan yang memadai, tingkat pendidikan dan kualitas tenaga kerja yang relatif rendah, dan dalam pengelolaan perusahaan masih menggunakan teknologi sederhana (penelitian Biro Kredit, Bank Indonesia 2005). Sedangkan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, didefinisikan atau kriteria UMKM yang berlaku saat ini didasarkan kepada nilai kekayaan bersih dan nilai hasil penjualan. Dilihat dari

karakteristiknya, beberapa studi menunjukkan bahwa usaha mikro, usaha-usaha kecil, dan menengah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga perlu dilakukan pemisahan pengelompokan ketiga jenis usaha tersebut, terutama untuk kebutuhan pemberian jenis bantuan atau pembinaan yang diperlukan oleh masing-masing usaha. Adapun kriteria pembagian nilai aset dan omset untuk menentukan suatu usaha termasuk jenis usaha mikro, kecil, atau menengah, yakni sebagai berikut: (1). Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang, yakni berupa kriteria aset maksimal Rp 50 Juta, dan kriteria Omzetm maksimal Rp 300 juta rupiah. (2). Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha, dan bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang, yakni dengan kriteria aset antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, dengan kriteria omzet antara Rp 300 juta – Rp 2,5 Miliar rupiah. (3). Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari usaha kecil atau usaha besar, yang memiliki jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, yakni kriteria aset antara Rp 500 juta – Rp 10 Miliar, dan dengan kriteria Omzet: >Rp 2,5 Miliar – Rp 50 Miliar rupiah.

Dari kriteria diatas, maka usaha kecil dan menengah memiliki potensi yang besar dalam pertumbuhan tenaga kerja karena potensinya untuk memperluas usahanya cukup besar, dan usaha menengah dipandang sebagai cikal bakal atau embrio dari usaha besar. Di lain pihak usaha mikro, umumnya dengan tingkat pertumbuhan yang relatif terbatas, dari waktu ke waktu hampir jarang yang berkembang menjadi usaha kecil dan menengah. Menurut Iwantono (2006) dalam Sri (2007) permasalahan UKM di Indonesia yang sangat bervariasi, meliputi: (1). Akses pasar. Pada umumnya, UKM tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai pasar. Mereka tidak memahami dan tidak memiliki informasi tentang pasar potensial atas barang dan jasa yang dihasilkan. Selain itu, pelaku UKM juga tidak memahami sifat dan perilaku konsumen pembeli hasil produksinya dan juga sering gagal bertransaksi dalam kegiatan ekspor karena tidak terbiasa dengan praktek-praktek bisnis internasional. (2). Kelemahan dalam pendanaan dan akses pada sumber pembiayaan. Hal ini dikarenakan oleh adanya keterbatasan UKM dalam penyediaan dukungan keuangan yang bersumber dari internal usaha. Selain itu, sumber-sumber keuangan eksternal baik yang berasal dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank, masih belum sepenuhnya berpihak pada UKM. Ketersediaan dana melalui berbagai kredit masih terbatas, prosedur perolehan yang rumit dan persyaratan yang cukup membebani seperti persyaratan administratif dan penjaminan. (3). Kelemahan dalam organisasi dan manajemen. Dalam hal ini, sumberdaya manusia yang dimiliki UKM sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan rendah, tidak memiliki ketrampilan manajemen dan

bisnis yang memadai. Hal tersebut mengakibatkan para pelaku UKM akan mengalami kesulitan untuk berinteraksi dan bersaing dengan pelaku bisnis lainnya yang memiliki keterampilan manajemen modern. (4). Kelemahan dalam kapasitas dan penguasaan teknologi. Para pelaku UKM mengalami kesulitan dalam menghasilkan produk yang selalu dapat mengikuti perubahan permintaan pasar, sehingga barang-barang yang dihasilkan umumnya konvensional, kurang mengikuti perubahan model, desain baru, pengembangan produk dan bahkan mereka tidak menyadari pentingnya mempertahankan hak paten. (5). Kelemahan dalam jaringan usaha. Networking atau jaringan bisnis merupakan unsur baru keunggulan bersaing dan penetrasi pasar. Kualitas SDM yang masih rendah dalam penguasaan teknologi informasi, mengakibatkan UKM pada umumnya belum mampu membangun jaringan bisnis dan memanfaatkan kemajuan dalam teknologi informasi. Cara-cara pemasaran maupun pengadaan bahan baku masih terbatas pada cara-cara konvensional menyebabkan mereka tidak mampu memanfaatkan potensi pasar melalui pengembangan jaringan usaha.

Disamping itu, kondisi dan karakteristik yang heterogen dari masing-masing UMKM yang berada di semua sektor ekonomi, maka program pemberdayaan sektor UMKM harus didekati pula dengan dimensi yang cukup luas. Menurut Partomo dan Soejoedono (2004) dalam Ana (2006), strategi bisnis untuk mempertahankan dan mengembangkan UKM adalah sebagai berikut: (1) Perlu dipelajari terlebih dahulu tentang ciri-ciri, definisi/pengertian, kelemahan-kelemahan, potensi-potensi yang tersedia serta perundang-perundangan yang mengatur tentang UKM. (2). Diperlukan bantuan manajerial agar tumbuh inovasi-inovasi dalam mengelola UKM secara berdampingan dengan usaha-usaha besar. (3). Secara vertikal dalam sistem gugus usaha, UKM bisa menjadikan diri sebagai komplemen-komplemen usaha bagi industri perusahaan produsen utama. Diperlukan suatu strategi UKM untuk menjalin kerja komplementer dengan usaha-usaha besar. (4). Kerjasama bisa berbentuk koperasi dan secara bersama-sama beroperasi masuk (entry) dalam usaha tertentu. Di Indonesia, kemitraan usaha yang berbentuk koperasi merupakan strategi bisnis yang sangat penting, sehingga pemerintah menganggap perlu membentuk departemen khusus untuk menangani UKM dan Koperasi. Dalam pengembangan UMKM perlu terlebih dahulu diidentifikasi permasalahannya dan potensi yang dimungkinkan untuk dapat dikembangkan, sehingga dapat dirumuskan strategi yang efektif dalam menumbuhkan UMKM. Salah satu kendala yang dihadapi terkait dengan manajemen usaha, SDM, dan masih relatif terbatas penggunaan teknologi tepat guna, akibatnya daya saing produk UMKM sangat terbatas. Untuk itu, perlu dilakukan strategis yang terencana dan terukur agar dapat menghasilkan sebagaimana yang diharapkan.

Dari pemikiran diatas, maka dapat dikemukakan sebagai hipotesa dalam penelitian ini, adalah:

Ho = Tidak terdapat pengaruh Pemberdayaan UMKM terhadap penanganan Kemiskinan Sosial,

Ha = Terdapat pengaruh Pemberdayaan UMKM terhadap penanganan Kemiskinan Sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan orientasi untuk mengetahui pengaruh Pemberdayaan UMKM terhadap penanganan Kemiskinan Sosial. Variabel penelitian pemberdayaan UMKM diukur melalui 6 (enam) indikator yaitu: penciptaan Iklim Usaha yang kondusif, bantuan permodalan, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, pelatihan, mengembangkan promosi. Sedangkan variabel kemiskinan sosial diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu: ketidakmampuan mencukupi kebutuhan pokok, ketidakberdayaan, kerentanan menghadapi situasi darurat, ketergantungan, dan keterasingan. Data-data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 120 responden yang dipilih secara acak di 6 desa Kabupaten Ngawi. Masing-masing desa ditetapkan 20 responden secara stratified random sampling, yang terdiri dari: kepala desa dan perangkat desa, BPD, LKMD, PKK, serta UMKM-UMKM masyarakat desa. Penilaian responden diukur menggunakan skala likert dengan gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang berupa kata-kata antara lain: a) Sangat setuju dengan skor 5, b) setuju dengan skor 4, c) Ragu-ragu dengan skor 3, d) Tidak setuju dengan skor 2, dan e) Sangat tidak setuju dengan skor 1. Sedangkan metode analisis data menggunakan model analisis regresi dengan pengolahan melalui SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Test Regresi

Hasil perhitungan regresi antara variabel Pemberdayaan UMKM terhadap Penanganan Kemiskinan Sosial, adalah:

Tabel. 1. Pengaruh Pemberdayaan UMKM terhadap Penanganan Kemiskinan Sosial

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.487	1.501		-.324	.741
	UMKM	1.006	.026	.956	36.887	.000

a. Dependent Variable: Penanganan Kemiskinan Sosial

Dari persamaan regresi ($Y = a + bX$), dapat diidentifikasi: (1) Nilai konstanta $-0,487$; menunjukkan Pemberdayaan UMKM akan konstan apabila variabel penanganan kemiskinan Sosial sama dengan nol (tidak ada), dengan asumsi faktor-faktor lain tetap atau tidak berubah nilainya. (2) Variabel Pemberdayaan UMKM yang bernilai $1,008$ (positif) menunjukkan adanya pengaruh Pemberdayaan UMKM terhadap penanganan kemiskinan sosial. Jika Pemberdayaan UMKM meningkat sebesar 1 satuan maka penanganan kemiskinan sosial juga meningkat sebesar $1,008$. Dengan demikian

Pemberdayaan UMKM berpengaruh positif terhadap penanganan kemiskinan sosial.

Uji F

Untuk mengidentifikasi signifikant tidaknya pengaruh Pemberdayaan UMKM terhadap penanganan kemiskinan sosial dapat dilakukan melalui uji F. Dari hasil perhitungan menunjukkan:

Tabel. 2 Uji F: Pengaruh Pemberdayaan UMKM terhadap Penanganan Kemiskinan Sosial

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7742.914	1	7741.914	1354.06	.000 ^b
	Residual	671.352	117	5.687	2	
	Total	8415.200	118			

a. Dependent Variable: Penanganan Kemiskinan Sosial

b. Predictors: (Constant), UMKM

Dari hasil uji F dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar $1354.062 > F_{tabel}$ sebesar 1,368 pada tingkat keyakinan 95%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa variabel Pemberdayaan UMKM secara simultan berpengaruh terhadap variabel penanganan kemiskinan sosial secara nyata atau signifikan.

Test Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi adalah:

Tabel 3. Hasil Uji Determinasi antara Pemberdayaan UMKM dan penanganan Kemiskinan Sosial

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.956 ^a	.870	.870	2.38517

a. Predictors: (Constant), UMKM

b. Dependent Variable: Penangan Kemiskinan Sosial

Besarnya *Multiple Coefisien of Determination (R Square)* adalah 0,870 atau 87 % yang berarti penanganan kemiskinan sosial dapat dijelaskan oleh variabel Pemberdayaan UMKM, sedangkan sisanya 13 % dijelaskan oleh variabel lain

yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Pemberdayaan UMKM menjadi strategis dalam penyelesaian kemiskinan sosial pada umumnya, karena sebagian besar pelaku UMKM adalah masyarakat kecil atau miskin. Dengan pemberdayaan UMKM secara tepat akan mendorong peningkatan mobilitas kegiatan ekonomi rakyat kecil, sehingga dapat meningkatkan pula pendapatan dan kesejahteraannya. Program pemberdayaan UMKM secara tepat harus dilakukan dengan identifikasi kelemahan-kelemahan UMKM karena masing-masing UMKM berbeda-beda masalah yang dihadapinya, misalnya UMKM di kota-kota maupun UMKM di pedesaan. Namun demikian, program pemberdayaan UMKM secara umum mencakup beberapa aspek, yaitu: (1) Kebijakan Pemerintah, yaitu kebijakan yang jelas, tegas dan diperlukan guna menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan sektor UMKM. (2) Sumber Pembiayaan yaitu terkait dengan kemudahan mendapatkan kredit perbankan, khususnya persyaratan dan prosedurnya. (3) Bantuan Teknis meliputi semua aspek kegiatan usaha, yaitu keterbatasan dalam pengeloan usaha, pemasaran, produksi, akuntansi, dan keuangan. (4) Pengembangan Kelembagaan guna memudahkan koordinasi pelaku UMKM sehingga penanganan dapat dilakukan lebih komprehensif.

SIMPULAN

Pemberdayaan UMKM sebagai strategi yang efektif dalam penanganan kemiskinan sosial, karena pelaku UMKM sebagian besar masyarakat kecil atau miskin. Dengan pemberdayaan UMKM dapat menumbuhkan peningkatan kualitas kegiatan usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Program pemberdayaan UMKM harus dilakukan secara komprehensif agar penanganannya dapat dilakukan secara menyeluruh dan menjadi efektif karena orientasi program dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan dan fokus sesuai dengan persoalan yang dihadapi masing-masing UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Azis dan Herani Ruslan, 2009, *Membangun Industri Berbasis Ekonomi Kerakyatan Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Kertas Karya Perorangan (TASKAP), Kursus Singkat Angkatan (KSA) XIV LEMHANNAS RI
- [2] Ghozali, Imam, 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Ketiga, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- [3] Nursalam. 2010. *Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Masyarakat Desa Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri*. Malang. Skripsi
- [4] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- [5] http://www.ekonomirakyat.org/edisi_14/artikel_2.htm
- [6] <http://www.tnp2k.go.id/download/79169WP480304FINAL.pdf>
- [7] <http://www.braindilog sociology.or.id/2017/12/strategi-penanggulangan-kemiskinan-di.html>
- [8] <http://e-journal.uajy.ac.id/1756/3/2EP15294.pdf>